

## PENGEMBANGAN KOTA SUKABUMI DALAM MEWUJUDKAN ‘SUKABUMI CYBER-CITY’

### DEVELOPMENT OF SUKABUMI CITY IN A REALIZING ‘THE SUKABUMI CYBER-CITY’

**Syarif Budhirianto**

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung  
Jln. Pajajaran No. 88 Bandung 40173 Telp. (022) 6017493 Fax. (022) 6021740. Hp. 08122393677  
Email: syarifbudhi@gmail.com

diterima tanggal 25 Agustus 2017 | direvisi tanggal 24 September 2017 | disetujui tanggal 26 Oktober 2017

#### **ABSTRACT**

*Sukabumi Cyber City (SSC) is the flagship program of Sukabumi City Government in the field of information and communication technology (ICT) in providing faster and cheaper public services. The focus of the study is to describe the development of the SSC program as a medium for communication and information, as well as to explain the policy of development of government apparatus resources in support of the program. The research is qualitative descriptive, by conducting in-depth interviews with key informants within the Office of Communication and Informatics (Diskominfo) of Sukabumi City. The result of the research shows that the development of cyber-city concept has been done in synergy with all existing working units of the regional apparatus, that is by bringing together the common commitment and responsibility in facing the development strategy of ICT area continuously. Transparent information policy through this program is technically still lacking, because the process of screening news content must be through the stakeholders (stakeholders). Development of education and training system in forming government apparatus resource is done by knowledge sharing which is based on learning by doing directly practiced every training material, while the quality of apparatus resource needs to be improved both from managerial aspect and technical capability in ICT field, and also support and the government's commitment to the concept of cyber-city that is aligned with the Jabar Cyber Province program.*

**Keywords:** *Development, Sukabumi, cyber-city*

#### **ABSTRAK**

*Sukabumi Cyber-city (SSC) merupakan program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah. Fokus kajian adalah mendeskripsikan pengembangan program SSC sebagai media komunikasi dan informasi, serta memaparkan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah dalam mendukung program tersebut. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan konsep *cyber-city* telah dilakukan secara sinerjis dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada, yakni dengan menyatukan kesamaan komitmen dan tanggungjawab dalam menghadapi strategi pembangunan daerah TIK secara berkelanjutan. Kebijakan transparan informasi melalui program ini secara teknis masih kurang, karena proses *screening* konten berita harus melalui para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengembangan Sistem pendidikan dan pelatihan dalam membentuk sumber daya aparatur pemerintah dilakukan dengan *knowledge sharing* yang berbasis pada *learning by doing* yang langsung dipraktekan setiap materi pelatihan, sedangkan kualitas sumber daya aparat perlu ditingkatkan, baik dari aspek manajerial maupun kemampuan teknis di bidang TIK, serta dukungan dan komitemen pemerintah terhadap konsep *cyber-city* yang diselaraskan dengan program *Jabar Cyber Province*.*

**Kata kunci:** *pengembangan, Sukabumi, cyber-city*



## I. PENDAHULUAN

Konsep *cyber-city* merupakan konsep kota modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh Indonesia, ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan komunikasi dengan mudah dan cepat. Dengan sebuah konsep kota masa depan yang berbasis TIK, merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan masyarakat atas akses yang lebih mudah dan cepat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain akan tersaji dalam satu konsep yang saling berhubungan (Wardhanu, 2016).

Penerapan konsep tersebut, membuka mata bagi masyarakat akan manfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kedepan nanti sebagian besar masyarakat kota akan semakin bergantung pada pelayanan informasi yang berbasis internet untuk menjalani berbagai aktivitasnya. Tolok ukurnya adalah kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan informasi dan komunikasi digital yang serba cepat, efisien dan efektif. Pola kerja dinamis seperti ini tidak sekedar menunjukkan gaya hidup modern tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang. Hal ini mirip seperti pemanfaatan telepon genggam (*handphone*) yang hampir semua kelas sosial masyarakat menggunakannya.

Terkait pentingnya konsep *cyber-city* yang diikuti berbagai kota-kota besar di Indonesia, Pemerintah Kota Sukabumi mulai tanggal 1 April 2016 lalu mengembangkan konsepnya sebagai kota cerdas yang berlandaskan pada pelayanan TIK. Konsep tersebut akan mengembangkan layanan pemerintahan berbasis aplikasi yang terdapat dalam

perangkat komunikasi dan nantinya masyarakat bisa mengunduh program aplikasi *Sukabumi Cyber-city* (SCC), dimana masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik lagi, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan layanan lainnya, serta masyarakat bisa menyampaikan berbagai keluhan dan pertanyaan secara digital kepada pemerintah.

Pada sektor pengembangan ekonomi, pemanfaatan SCC di Kota Sukabumi juga penting dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, terutama dari sektor jasa pelayanan informasi di bidang pariwisata yang tumbuh dan berkembang dengan cepat, hal ini tentunya perlu di *back up* oleh *reservasi* secara daring, seperti pelayanan hotel, paket wisata, transportasi dan sebagainya. Gambaran fakta di atas menunjukkan bahwa ke depan nanti sebagian besar masyarakat kota akan semakin bergantung pada teknologi informasi untuk menjalani berbagai aktifitasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang dikaji adalah: (1). Mendeskripsikan pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi sebagai media komunikasi dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan program SCC yang telah berjalan; (2). Memaparkan bagaimana kebijakan pengembangan programnya dalam mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat; (3) Bagaimana kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dalam mendukung program tersebut.

Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi sebagai media informasi dan komunikasi sesuai dengan konsep SCC yang mengoptimalkan pemanfaatan konten dan meningkatkan kualitas

layanan publik, serta memaparkan bagaimana pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola program tersebut. Kegunaan penelitian bagi Pemkot Sukabumi dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat memantau kinerja SKPD masing-masing melalui jaringan *online* secara integratif dan komprehensif, sehingga aspek komunikasi dan informasi dapat berlangsung secara terbuka, akuntabilitas oleh masyarakat; Berguna bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jendral Aptika dalam menyusun kebijakan program pengembangan teknologi komunikasi dan informatika di seluruh instansi pemerintah, sehingga masyarakat siap menyongsong era masyarakat informasi.

Dinas yang berkompeten dalam pengembangan TIK di Kota Sukabumi adalah Diskominfo Kota Sukabumi dengan visi: terwujudnya informasi yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya dalam memfasilitasi masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Dengan kepemilikan Situs [www.sukabumi.go.id](http://www.sukabumi.go.id), *e-government* Kota Sukabumi telah mendapat penghargaan ICT Pura Tingkat Madya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola terbaik di Indonesia pada tahun 2015 lalu, bahkan Kota Sukabumi sekarang ini dijadikan sebagai pilot proyek pembangunan infrastruktur *Jabar Cyber Province (JCP) dan Jabar Zone*, diharapkan kebutuhan data dan informasi yang akurat dapat dicapai serta dimanfaatkan lebih optimal oleh kalangan pemerintah, dunia pendidikan, *stakeholder* serta masyarakat luas.

Dengan konsep *Jabar Zone* akan memberikan kemudahan akses layanan data dan informasi kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat

menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi dan Jawa Barat. Dengan mengadopsi konsep *Cyber City*, Kota Sukabumi juga meningkatkan dalam bidang pendidikan, dimana sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kota Sukabumi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara elektronik (*e-learning*)

Selain itu dengan telah dicanangkannya Kota Sukabumi sebagai kota vokasi dengan menitikberatkan pada pola *link and math* antara dunia pendidikan terutama jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang siap berkompetisi di berbagai sektor perekonomian baik lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Melalui program pemberdayaan informasi dan komunikasi dengan di dukung personil, sarana dan prasarana serta dana yang cukup memadai diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi menjadi organisasi yang dapat melaksanakan tupoksi organisasi dengan baik dan mampu memenuhi harapan semua pihak. Sebagai organisasi pemerintahan daerah yang dinamis, efektif, efisien, produktif, kolaboratif, akomodatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsibility governance*), sehingga diperoleh pelayanan prima kepada masyarakat (Dwijanto, 2005).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kota Sukabumi telah menetapkan rencana strategi, tujuan dan sasaran utama kegiatan sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi No. 50 Tahun 2014. yakni: Memfasilitasi manajemen pemerintah daerah yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif ma-

syarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kota Sukabumi sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga dan terpelihara.”

Konsep *Cyber City* yang sudah dicanangkan oleh Pemkot Sukabumi, sebagian besar telah terhubung ke semua SKPD di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dalam satu jaringan komunikasi/intranet, seperti *local area network* (LAN), terbukanya komunikasi pemerintah kota dengan masyarakat luas melalui media TIK, serta menyebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat luas dengan melalui media TIK, tanpa ruang batas dan waktu.

Kondisi eksisting perkembangan *e-government* di Pemerintah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Kantor Kominfo, umumnya baru sampai tahap satu, yaitu menerbitkan data dan informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga (*via website*) dan juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah sebagai *internally networked public-service provider*. Kinney (2001), sendiri menyatakan bahwa pengembangan SCC yang didalamnya terdapat *e-government* harus memenuhi tiga tahapan besar, yaitu: *e-information*, *e-commerce* dan *e-democracy* yang merupakan tiga fase besar dalam pengembangannya (dalam Rizki, 2014)

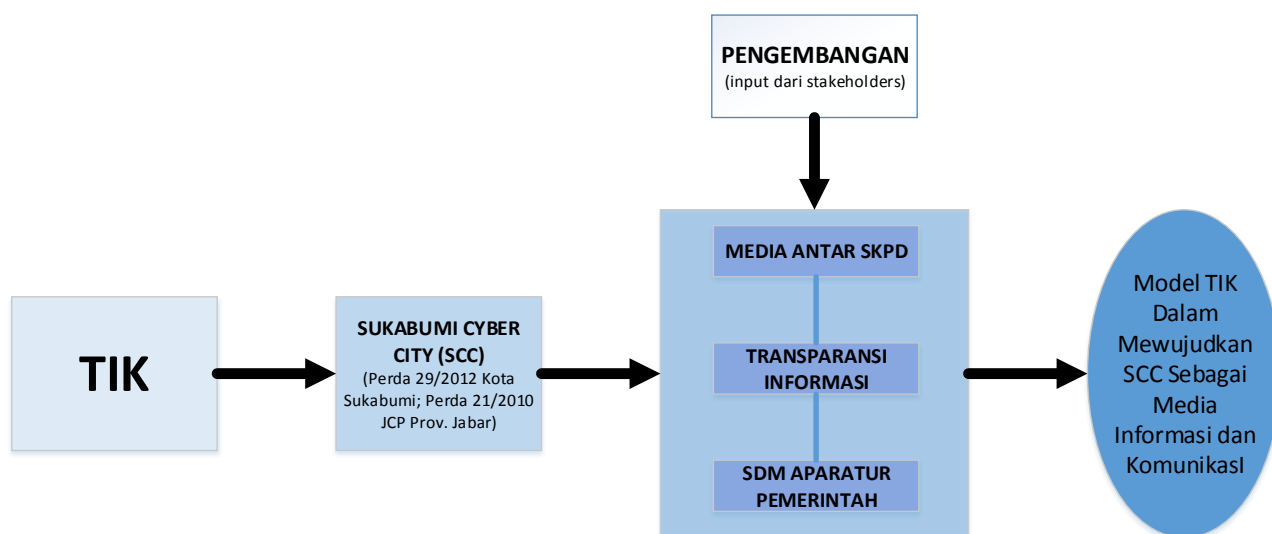
Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan yang secara implementatif diwujudkan dalam dalam program SCC merupakan pilihan yang tepat guna mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna dapat dimudahkan secara efektif dan efisien eksistensi terhadap pelayanan informasi yang berasal dari portal pemerintah. Visi dalam program SCC juga dilandasi pada dua prinsip dasar, yaitu (1) memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis

pelayanan publik, dengan prioritas memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, memungkinkan terjadinya kerja sama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi. (2) Membangun lingkungan yang kompetitif, dimana sektor swasta dapat berperan dalam hal pelayanan publik (Fahrurrazi, 2015).

Penerapan *e-government* dalam menunjang transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas Pemkot Sukabumi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi, dan transaksi (Indrajit, 2012). Portal tersebut menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik.

Dalam konteks membangun SCC yang terhubung dengan fasilitas TIK atau *e-government* merupakan momen yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara baik dan efisien agar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Keberadaan UU KIP juga akan menjadi bagian penting dari solusi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan United Nation “*Centre for Good Governance*”, Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi adalah hak asasi manusia yang





**Gambar 1.** Alur Pengembangan SSC sebagai Media Informasi dan Komunikasi  
**Picture 1.** Flow of SSC Development as Information and Communication Media

mendasar dan universal, dimana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi dan komunikasi serta memberikan kemudahan untuk mengaksesnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan. (Harimurti, 2007)

Penerapan e-government dalam konteks SSC merupakan penunjang good governance seperti, transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses komunikasi dan informasi antara pemerintahan dengan masyarakat, dimana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar menarik pengguna mau mengakses secara berkelanjutan, informasi apa yang paling dibutuhkan, dimana informasi terbagi dua, yaitu jenis informasi dan jenis data.

Jenis informasi adalah informasi yang disajikan berhubungan dengan sumber daya pelayanan publik, seperti pelayanan umum, potensi

dan peluang investasi, komoditi perdagangan, infrastruktur pendukung, akomodasi dan sebagainya. Jenis data adalah bentuk informasi yang disajikan dalam portal, baik berupa teks, gambar, maupun peta. Sedangkan proses komunikasi, yaitu tersedianya media untuk berinteraksi antara pengunjung dengan pemerintah secara online, baik berupa email, kontak pengunjung atau forum diskusi online (Budhirianto, 2014).

Berdasarkan pada kerangka teori yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam sebuah diagram tentang alur pengembangan SSC sebagai media informasi dan komunikasi seperti pada gambar 1.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi pada objek yang diteliti secara sistematis dengan melakukan kunjungan langsung secara interaksi dan

partisipasif. Wimmer dan Dominick (2000), dalam riset ada dua jenis metode observasi, yaitu partisipan dan non partisipan. Sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dan terstruktur dengan para informan kunci (*key informan*), sehingga mendapat data yang komprehensif.

Adapun wawancara dilakukan dengan para pelaku/pengelola SSC pada Dinas Kominfo Kota Sukabumi, serta aparat kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Sukabumi, yakni: Kepala Dinas Kominfo Bapak Drs. Moh. Karman M.Pd, Kasi TIK dan Aptel Bapak Nugroho Adimihardja, ST, Kasi Perencanaan Pengembangan Evaluasi dan Postel Bapak Riskan Satya, SH, Kepala Kecamatan Warungdoyong Bapak Samiarto, dan Kepala Kecamatan Warungdoyong Bapak Drs.Edi Sukarya, dan dari Kelurahan Nyomplong Bapak Iyan Rojiman, SH.

Program Sukabumi Cyber City dipilih karena sistem pengelolaan cyber city yang dicanangkan diseluruh Provinsi Jawa Barat di bidang TIK lebih maju dari daerah lainnya, terbukti kota ini termasuk 27 kota dan kabupaten dari 168 daerah di Indonesia telah meraih penghargaan Information, Communication and Technology (ICT) Pura Tahun 2015 tingkatan Madya, sehingga daerah ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

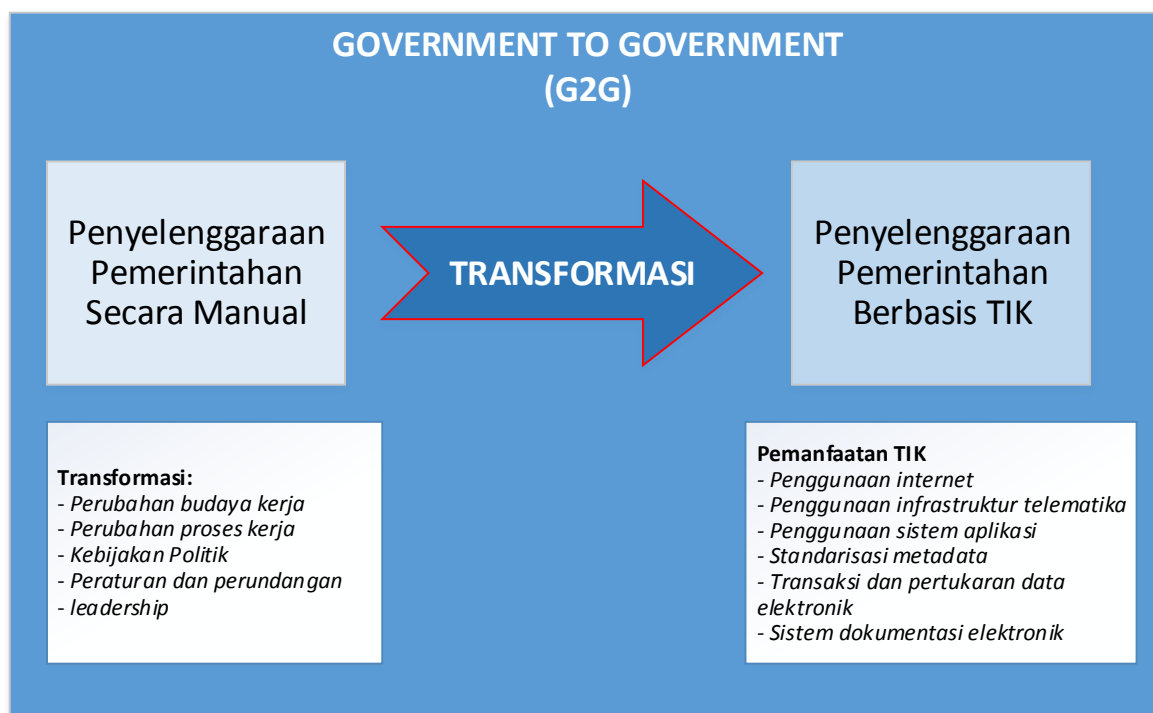
#### **A. Pengembangan SCC Pada Pemerintah Kota Sukabumi**

Program SCC yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media informasi dan komunikasi

sudah dilaksanakan dalam aktifitas pelayanan publik, bahkan sudah diterapkan pula pada setiap kantor kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Sukabumi yang awalnya mengandalkan sistem jaringan *local area network (LAN)* yang sebatas masing-masing dinas/kantor, sekarang sudah mulai mengembangkan sistem internet untuk bisa menghubungkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara integrasi. Shanab (2012) menyatakan faktor sistem jaringan merupakan pendukung penerimaan *e-government*, dan Harrasi (2013), kualitas dari teknologi informasi juga merepresentasi tampilan atau *user interface* dari *website* pemerintah atau dikenal dengan *citizen centric* atau *government to citizen*.

Meskipun Kota Sukabumi sudah mendapat penghargaan ICT Pura Tingkat Madya dari Kementerian Kominfo tahun 2015 lalu, Kota ini belum merasa puas dengan kondisi TIK yang ada, dan terus berbenah dengan meningkatkan jaringan infra struktur yang ada, sehingga public akan lebih mudah dan cepat mengakses pelayanan publiknya. Konsekuensi adanya transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bermula dari manual menuju yang berbasis TIK, maka terjadi perubahan dalam budaya kerja, proses kerja, yang seluruhnya dapat dimanfaatkan melalui penggunaan internet, sistem aplikasi, serta dengan pertukaran data secara elektronik. Sebagaimana dalam gambar diterangkan pada gambar 2.





Sumber: Kantor Komunikasi dan Informatika, Kota Sukabumi, 2016  
Source: Office of Communication and Informatics, Sukabumi City, 2016

**Gambar 2.** Transformasi Pemanfaatan TIK  
**Picture 2.** Transformation of ICT Utilization

Pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi sebagai media komunikasi dan informasi melalui konsep SCC tersebut, diantaranya dengan terhubungnya semua satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu jaringan komunikasi/intranet (LAN dan WAN), serta terjadinya komunikasi (teks, audio, visual), sehingga fungsi pengawasan lebih mudah dilakukan, tanpa melalui hubungan fisik yang selama ini sering dilakukan. Shanab (2012), faktor infrastruktur dalam jaringan dapat memengaruhi kepuasan penerimaan apabila adanya kemudahan dan kecepatan dalam mengakses internet, serta faktor lingkungan social juga dapat memengaruhi penerimaan terhadap *e-government*. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan publik diperlukan

hubungan (*relationship*) antar pengambil keputusan akan lebih mudah dilakukan, karena pemanfaatan TIK dalam perubahan proses kerja dan budaya kerja diperlakukan sebagai bagian yang utuh dalam pemerintahan, dan harapan untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) berbasis informasi dapat tercapai.

Dari sisi komunikasi dan informasi organisasi, konsep pengembangan jaringan internet akan memudahkan proses pengorganisasian sesuai prinsip pembagian kerja, sehingga kebutuhan informasi bagi masyarakat dan pemerintah saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama dalam memberikan pelayanan publik. Proses komunikasi *online* antar pimpinan di Pemkot Sukabumi akan

terjalin secara baik, apakah dengan level di atas maupun dengan level di bawah.

Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, sebagai pengelola sarana teknologi informasi dan komunikasi, menyatakan: “transformasi menuju penyelenggaraan berbasis TIK, yang awalnya dilakukan secara manual, sekarang diupayakan dengan *online*, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, sistem dokumentasi elektronik, serta standarisasi perubahan budaya kerja lainnya. diantaranya pemerintah menyediakan sarana TIK agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di setiap lingkungan pemerintah, serta memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat mudah diakses baik di dalam maupun di luar negeri”. Program SCC yang dicanangkan Pemkot Sukabumi sejak tahun 2014 hingga sekarang, koneksi jaringan berkembang pesat sampai kepada organisasi pemerintahan kecamatan bahkan pada kelurahan. Skala prioritas informasi yang disajikan kepada masyarakat oleh Kantor Komunikasi dan informatika. Peraturan Walikota Sukabumi No. 30 Tahun 2012, dengan konsep *Cyber city-nya* telah menerbitkan data dan informasi tentang potensi kewilayahan serta informasi dari berbagai bidang pemerintahan yang datanya di *update* masing-masing SKPD.

Hubungan kerjasama antara Kantor Kominfo dengan satuan kerja sinerjitasnya ditingkatkan dalam suatu infrastruktur jaringan yang terpadu, yakni dengan menyediakan fasilitas komunikasi dua arah (*e-government* dikembangkan sebagai *internally networked public-service provider*). Komunikasi dengan SKPD dalam menyajikan konten informasi dan data aktual dilakukan oleh para pejabat yang berkompeten di setiap SKPD,

sehingga informasi yang disajikan bidangnya lebih luas, tidak sebatas potensi kewilayahan Kota Sukabumi yang dieksplor yang selama ini terjadi (*web statis*). Hal ini selaras dari pandangan *United Nation “Centre for Good Governance”, Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi adalah untuk memberikan kemudahan untuk mengaksesnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan.* (Harimurti, 2007)

Proses *updating* yang dilakukan akan selalu terjadi pada setiap saat sesuai dengan dinamika informasi dimasyarakat (*web dinamis*). Dengan demikian, konsep SSC sebagai implementasi *e-government* dengan melakukan ekspansi jaringan dan konten sesuai dengan program *Jawa Barat Cyber Province* (JCP) Pemprov Jabar, yakni: (1). Terbukanya komunikasi pemerintah Kota Sukabumi dengan masyarakat luas melalui pengembangan TIK; (2) Menyebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat luas dengan melalui media TIK, tanpa ruang batas dan waktu; dan (3) Memberikan layanan akses internet kepada masyarakat luas dengan data informasi yang aktual. Menurut Seifert dan Petersen (2002) dan Fang (2002) , dalam membuat konten, umumnya dibuat dalam beberapa sudut pandang yang perlu dibutuhkan publik, seperti bidang bisnis, masyarakat, pemerintahan, teknologi, proses dan ekonomi. Konsep ini sebagai suatu jalan bagi pemerintah untuk menggunakan ICT seinovatif mungkin, terutama aplikasi yang berbasis web, untuk menyediakan layanan informasi yang lebih variatif dan sekreatif mungkin untuk memberikan yang terbaik.

Dengan konsep tersebut, fungsi komunikasi interaktif diantara satuan kerja Kota Sukabumi dilakukan secara komprehensif dan kontinyu dapat

menyatukan kesamaan persepsi, komitmen, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan internet. Bahwa untuk mendesain suatu program *cyber city* dengan menyajikan informasi dan komunikasi yang baik perlu dilakukan konten secara integratif, sebab dengan proses seperti itu eksistensi dan aktualitas informasi dan data akan berkelanjutan. Dalam komunikasi juga ditekankan agar setiap SKPD dan kantor kecamatan/kelurahan di Kota Sukabumi juga turut aktif meng *update* konten informasi sesuai dinamika masyarakat.

Pola komunikasi antar organisasi seperti itu penting dilakukan, dalam rangka saling mendukung terhadap komitmen yang dibuat, membangun kepercayaan, membangun keterbukaan dan transparansi, serta dapat mengomunikasikan tujuan kinerja masing-masing lembaga dalam satu jaringan internet. Apalagi disaat sekarang ini fungsi koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja sangat dibutuhkan dalam rangka menyatukan sikap dan pandangan terhadap strategi pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga konsep yang direncanakan bisa dilakukan secara terpadu dan terintegratif. Sifat ego dan cara berfikir parsial dari masing-masing kesatuan dapat dieleminir dan dengan keberadaan TIK, bahkan pejabat di atasnya setingkat Bupati, Walikota dan Gubernur dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan secara *online*.

Latar belakang kondisi geografis maupun birokratis Kota Sukabumi memerlukan aktivitas komunikasi dan informasi yang berbasis *digital*, karena akan semakin canggih sekaligus murah dan mudah, dan bagi masyarakat bisa mengakses selama 24 jam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta frekuensi pertemuan secara fisik semakin menurun. Prinsip koordinasi antar satuan kerja yang selama

ini kurang terbina, maka dengan sistem jaringan terpadu secara *online* bisa meningkat, apalagi di *back up* oleh bantuan Pemprov Jabar yang telah memfasilitasi PC di setiap kecamatan bahkan kelurahan. Kasi TIK dan Aptel serta Kasi PPE dan Postel pada Kantor Kominfo Kota Sukabumi, menyatakan, bahwa “sinerjitas dengan jaringan terpadu maka kesiapan dalam memberikan fasilitas informasi dan komunikasi kepada masyarakat akan mampu meningkatkan pelayanan yang *easier, cheap, dan faster*, begitu pula pada sumber daya aparatur sebagai pengelolanya akan lebih matang dan *qualifed* menghadapi tantangan demokratis dan globalisasi melalui pemanfaatan TIK dalam suatu *e-literacy* yang baik, baik penguasaan *e-government, e-procurement, e-budgetting, e-controlling, e-bussiness dan cyber law* yang perlu dikuasai oleh setiap aparat pemerintahan”.

Lebih jauh pernyataan dari Kasi PPE dan Postel, untuk meningkatkan hubungan komunikasi dan informasi melalui jaringan internet adalah “dengan meningkatkan infrastruktur TIK sebagai syarat utama dalam mendukung jaringan komunikasi antar SKPD, yakni dengan meningkatkan keberadaan internet *service provider* (ISP), *local area network, web hosting*, serta meningkatkan *bandwidth*.” Hal ini dilatar belakangi oleh masalah infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang memang masih belum tersebar secara merata, walaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (*budget*) yang *memadai* untuk semua keperluan ini, karena harga *bandwidth* internet saat ini masih cukup mahal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, sehingga dalam pemanfaatan internet di Kota

Sukabumi masih memerlukan dana yang besar sebagai dana operasionalnya.

Sebagai pengembangan awal yang dilakukan, Pemkot Sukabumi telah mengurangi kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak luar sebagai pihak yang bekerja sama, maka sekarang pengelolaannya diusahakan secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi kemampuan atau pengelolaan TIK sumber daya aparat sudah ada peningkatan dan tidak menggantungkan pada orang lain, baik dari *sisi hardware/software* maupun konten informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan untuk mengelola sendiri pada kantor Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator *website* antar SKPD di pemerintahan kota, serta koordinasi dengan Pemprov Jabar yang mempunyai program JCP, merupakan terobosan transformasi yang positif. Apalagi dalam pengembangan TIK di Kota Sukabumi ditunjang dengan dana yang memadai, meskipun sumber daya aparat perlu ditingkatkan lagi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan untuk mengelola sendiri pada kantor Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator *website* antar SKPD di pemerintahan kota, serta koordinasi dengan Pemprov Jabar yang mempunyai program JCP, merupakan terobosan transformasi yang positif. Apalagi dalam pengembangan TIK di Kota Sukabumi sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sumber daya aparat perlu ditingkatkan.

Untuk memanfaatkan jaringan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan TIK, pengoperasian jaringan komunikasi antar SKPD serta 7 (tujuh) kecamatan serta beberapa kelurahan sudah menyediakan sub domain atau *web hosting* pada websitenya, yakni tempat untuk berkomunikasi dan

informasi serta menampilkan data-data yang diperlukan oleh instansi lain atau oleh masyarakat. Koneksi ini dapat digunakan secara nonstop (*dedicated connection*) dengan bermacam akses internet. Kapasitas web yang disediakan juga ditingkatkan sampai penggunaan 2 GB, tapi dalam pemanfaatannya berkisar antara 50 Kbps sampai 50 MB.

Berdasar pada kapasitas yang dimiliki oleh kantor Kominfo Sukabumi dalam kebijakan pengelolaan jaringan TIK dinilai cukup baik, terutama dalam pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD dan beberapa kecamatan. Disamping itu, keberadaan akses internet yang terbatas dan tempat akses informasi yang jumlahnya juga terbatas, pemerintah dengan bantuan masyarakat bergotong royong menciptakan *access point* yang terjangkau.

## **B. Kebijakan Pengembangan SCC Dalam Rangka Meningkatkan Transparansi Informasi dan Komunikasi.**

Dalam rangka pengembangan transparansi informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan konsep *cyber city*, pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan transfer informasi dengan seluruh SKPD termasuk pada kantor kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung berbagai bidang yang dibutuhkan. Meskipun saat ini baru terhubung dengan 8 kelurahan dari 33 kelurahan yang ada, dan direncanakan dari tahun ke tahun sampai tahun 2017 semuanya akan terkoneksi. Dengan aspek transparansi informasi tersebut, akan terwujud pemerintahan yang baik, yang memenuhi kriteria *competence, transparency dan accountability*.

Keberadaan dan keunggulan jaringan internet melalui *website* dapat memfasilitasi pemenuhan hak warga untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya sekat birokrasi yang selama ini melekat pada aparatur pemerintahan. Dengan sistem informasi yang transparan dan akuntabel, memberikan input yang berharga bagi pemerintah. *Website* dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas pemerintah yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan sesuatu, seperti berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Sukabumi No. 30 Tahun 2014, tentang konsep *Cyber City*, pengembangan aktifitas informasi diserahkan kepada Kantor kominfo sebagai pusat penyedia data, dimana setiap satuan kerja diharuskan memposting informasi pada fasilitas sub domain *website* yang ada. Fasilitas lain yang memungkinkan kondisi eksisting sarana *e-government* oleh masyarakat adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap situs resmi pemerintah Kota Sukabumi, dengan alamat situs yang dapat di akses di [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id).

Menurut Kepala Kantor Kominfo Sukabumi, “pengembangan transparansi atau keterbukaan informasi yang sudah dikembangkan saat ini adalah : (1) Mengembangkan sistem pelayanan informasi melalui TIK agar lebih terjangkau masyarakat luas, tidak hanya bagi masyarakat Kota Sukabumi saja. (2) Penataan sistem manajemen dan proses kerja dengan pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terpadu. (3) Pemanfaatan TIK secara optimal. (4) Pengembangan sumber daya manusia di Pemerintah Kota Sukabumi dan peningkatan e-literacy masyarakat. Dengan keempat

pengembangan tersebut, kerja sama dengan instansi lain akan mudah dilakukan secara *online* yang terbuka, seperti kerja sama melalui sistem informasi administrasi perkantoran (SIAP), pusat informasi pasar (PIP) yang terdiri dari: sistem informasi pendidikan, sistem informasi kesehatan dan sistem informasi pertanian, serta sistem informasi perdagangan, yang semua itu berkolaborasi dengan dinas atau SKPD yang berkompeten. Bwalya (2009), menyatakan prinsip kolaborasi dan kerja sama dalam mendukung kebijakan pemerintah merupakan wujud dan komitmen dalam melaksanakan sistem *cyber-city*, sehingga dapat memengaruhi sukses atau tidaknya program pemerintah tersebut.

Sedangkan SKPD lainnya yang bersifat aplikatif, *website* kantor kominfo mengcadangkan informasi dan data yang posting melalui jaringan koneksi internet maupun melalui jemput bola. Pengembangan sistem informasi yang dikembangkan saat ini, konten lebih lengkap dan variatif, sehingga masyarakat pengguna relatif mudah dalam aksesibilitas informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan aspek transparansi informasi yang disediakan, informasi yang diterima umumnya melalui *screening* terlebih dahulu oleh para pejabat di SKPD, dengan tujuan agar informasi yang disajikan lebih tertib, dan tidak terjadi mis komunikasi dan interpretasi dari masyarakat hal-hal yang dapat merugikan. Sebagaimana InfoDev (2002), mendefinisikan dengan mengubah pemerintahan melalui ICT akan membuat lebih mudah diakses, efektif, dan lebih transparan serta dapat dipertanggungjawabkan pada prosesnya.

Dengan proses *screening* alur informasi yang akan diterima oleh pengguna/masyarakat akan lebih akomodatif dan lengkap, sebab beberapa konten informasi ada transformasi positif dari pembuat

kebijakan. Kelemahan dari cara seperti itu adalah esensi keterbukaan informasi/publik, kurang memenuhi semua unsur-unsur transparansi informasi, karena hal-hal yang menyangkut aktifitas kantor yang lebih teknis serta yang lebih sensitif cenderung tidak di *upload* kepada masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan masalah yang dianggap sensitif diberitakan, seperti laporan penggunaan anggaran oleh setiap satuan kerja. Padahal menurut esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bahwa setiap badan publik harus mengumumkan secara berkala (kinerja, penggunaan anggaran), diumumkan secara serta merta (kepentingan publik), tersedia setiap saat (pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan perjanjian dengan pihak ke tiga, dan pelayanan akses informasi) kepada masyarakat luas yang membutuhkan.

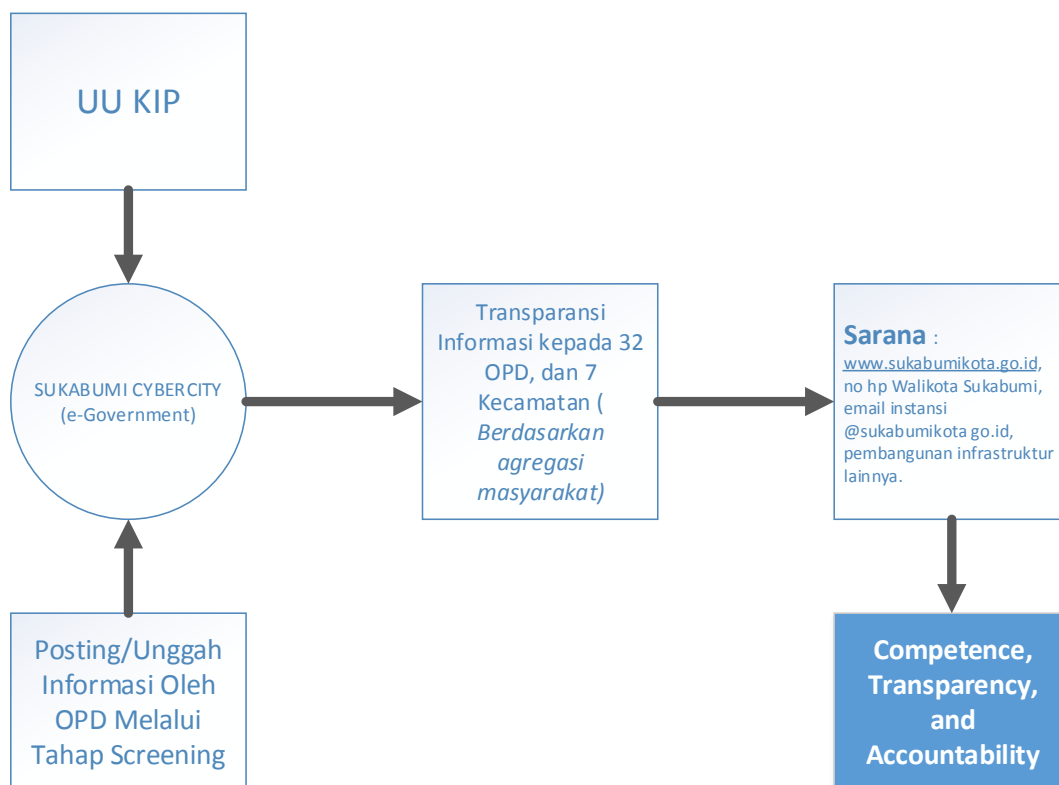
Proses *screening* informasi yang dilakukan oleh para pejabat di setiap satuan kerja, menunjukkan adanya berbagai persoalan politis dan manajemen yang sangat banyak dan memerlukan upaya pemecahan masalah yang begitu kompleks, sehingga perlu komitmen bersama dalam meningkatkan ltransparansi informasi. Sebaliknya, proses tersebut jangan dijadikan sebagai alat untuk mengurangi kebebasan masyarakat untuk mencari data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya.

Alternatif pemanfaatan *website* dilingkungan Pemkot Sukabumi tidak terbatas pada *website* yang dimiliki oleh Kantor Kominfo sebagai pembina dan pilot projek bagi satuan kerja lainnya, tetapi sistem informasi aplikatif lainnya yang akan mudah diakses masyarakat, dimana dalam pemanfaatannya masyarakat akan melakukan informasi dua arah mulai yang bersifat informatif, interaktif maupun

transaksi. Alternatif kemudahan dalam mengakses ini urgen sekali dilakukan, Kelly dan Swindell (2002), menyatakan publik akan terpenuhi suatu keinginan, ekspektasi akan layanan informasi pemerintah. Selanjutnya Spence (1994), proses penyediaan sistem informasi memudahkan langkah-langkah yang akhirnya menuju pada keputusan untuk mengadopsi, yang diawali dari *awareness* kemudian pada ketertarikan tahap selanjutnya.

Aspek pemanfaatan tersebut, dalam menunjang keterbukaan informasi publik, Pemkot Sukabumi telah memberikan sarana komunikasi dan informasi yang lengkap kepada masyarakat, apabila ada hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut dari *website* pemerintah maupun memberikan input bagi pemerintah sebagai agregasi kepentingan masyarakat, yakni: (1). Memberikan layanan informasi dan komunikasi secara lengkap dengan alamat [www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id)., dimana masyarakat dapat berkomunikasi secara interaktif dengan para pejabat yang berkompeten (2). Memberikan nomor *handphone* Walikota Sukabumi dengan nomor 081563200200 maupun akun media sosial yang dimiliki (3). email instansi @sukabumikota.go.id , serta (3) membangun infrastruktur yang tergabung dalam jaringan *local area network* dan *wireless area network*, dimana sampai tahun 2016 lalu telah mencapai 94% dari perangkat SKPD dan kantor kecamatan, dan hanya satu SKPD dan beberapa kecamatan saja yang belum terbangun infrastrukturnya.

Dalam pembangunan infra struktur informasi dan komunikasi, pemerintah Kota Sukabumi selalu meningkatkan layanan *online* kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, yakni dengan menyediakan koneksi internet 24 jam meningkatkan



**Gambar 3.** Pengembangan SCC Dalam Meningkatkan Transparansi TIK  
**Picture 3.** SCC Development to Growing Up Transparency of ICT

kapasitas *bandwith*-nya menjadi 4,5 MBPs serta menambah jaringan *accesspoint (hotspot)*, serta koneksi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Sukabumi, yaitu 32 OPD dan 7 kecamatan (dengan 200 komputer), disertai dengan pemberian akses internet. Dari sistem pengembangan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi menuju transparansi informasi tersebut, maka dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti pada Gambar 3

### C. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dalam Mendukung SCC.

Program kegiatan *Cyber City* di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi bermanfaat dalam memberikan pelayanan data dan informasi yang lebih cepat kepada pengambil kebijakan, antar

SKPD, *stakeholder* dan juga kepada masyarakat luas. Untuk itu skala prioritas peningkatan sumber daya aparat di bidang TIK baik dari sisi kualitas dan kuantitas lebih dikedepankan. Peran serta sumber daya manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi dan mencapai keberhasilan dalam organisasi sangat penting (Werther, 1993), sehingga harus dikelola mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan organisasi (Flippo, 1984). Dari pendapat tersebut, tergambar bahwa aparat pemerintah sebagai pengelola dari konsep *cyber city* sangat urgen memiliki kemampuan untuk mengorganisasinya sebagai salah satu faktor yang keberhasilan.

Terbatasnya SDM yang handal dalam mengembangkan TIK merupakan hal yang dihadapi oleh setiap pemerintahan termasuk SDM yang ada

di Pemkot Sukabumi. Disatu sisi kemajuan TIK sangat pesat perkembangannya, bahkan dunia teknologi informasi terlalu cepat berubah dan berkembang, sementara sebagian besar sumber daya manusia aparat yang ada di pemerintahan cenderung kurang memiliki motivasi untuk terus belajar mengejar kemajuan teknologi tersebut dan cenderung menjadi lambat dalam menyelesaikan aktifitas kantor. Berbeda dengan SDM yang ada dilingkungan bisnis/industri, yang sistem kinerjanya dituntut profesional dan berorientasi bisnis.

Menurut Kepala Kantor Kominfo Kota Sukabumi, sepakat bahwa disamping masalah kemampuan atau penguasaan aparat di bidang *software dan hardware*, hal yang dihadapi dalam merealisasikan *cyber city* adalah “kinerja aparat dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan efektif masih kurang, seperti prinsip berbagi masih kurang (*sharring*), dimana informasi dan komunikasi untuk mempermudah urusan belum merasuk di lingkungan SKPD Pemkot Sukabumi dan umumnya di Indonesia”. Tingkat penguasaan terhadap TIK dikalangan aparat menunjukkan masih rendah, hal ini akibat dari system pendidikan yang kurang memadai, baik terkait dengan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dan pembangunan system informasi untuk mengelola konsep *cyber city*. Jayanta dan Pramiyati (2015), menyatakan untuk pembangunan sistem informasi yang mumpuni, diperlukan pelatihan TIK dengan menggunakan metode *learning by doing* yang langsung mempraktekkan setiap materi pelatihan dengan menggunakan aplikasi pengolah data, pengolah lembar kerja, penggunaan internet sehat. Sedangkan pengetahuan tentang perangkat keras, dilakukan dengan

memberikan pemahaman perangkat TIK dan pengetahuan lainnya.

Sedangkan menurut Kasi IT dan Aptel serta Kasi PPE dan Postel, sepakat bahwa kesulitan besar yang dihadapi para pegawai dalam aktifitas kerja adalah “kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja) aktifitas kantor yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat, sehingga bila diperlukan lagi *file* nya tidak lengkap”. Padahal kemampuan untuk mendokumentasi merupakan bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering*. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemkot Sukabumi, menunjukkan para aparat perlu pembinaan dan pendidikan di bidang teknologi informasi agar dapat mengimplementasikan konsep *cyber city*. Karena bila tidak segera dibenahi dengan segera, maka kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. Konsekwensinya budget yang diperlukan dalam pengembangan TIK akan lebih besar, serta kemandiriannya belum bisa diandalkan.

Secara umum keadaan sumber daya manusia di Kantor Kominfo dan SKPD lainnya diketahui dari tingkat kesadaran, pemahaman dan pendaaygunaan TIK atau yang disebut *e-literacy* masih perlu ditingkatkan, sebagai *ability to read and write* atau kemampuan untuk membaca dan menulis. Sistem pengembangan yang sedang dilakukan oleh Pemkot sebagai solusi di atas perlu kemandirian dan keunggulan, yakni mengembangkan sistim pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan ketrampilan para pegawai dalam bidang teknologi informasi, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan kemampuan dan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi yang sangat



pesat. Cara yang dilakukan adalah dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat) yang diadakan oleh Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh Kementerian Kominfo, acara seminar dan *workshop* di berbagai tempat, serta *pendidikan chief information officer (CIO)* yaitu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang TIK (S2) sebagaimana harapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

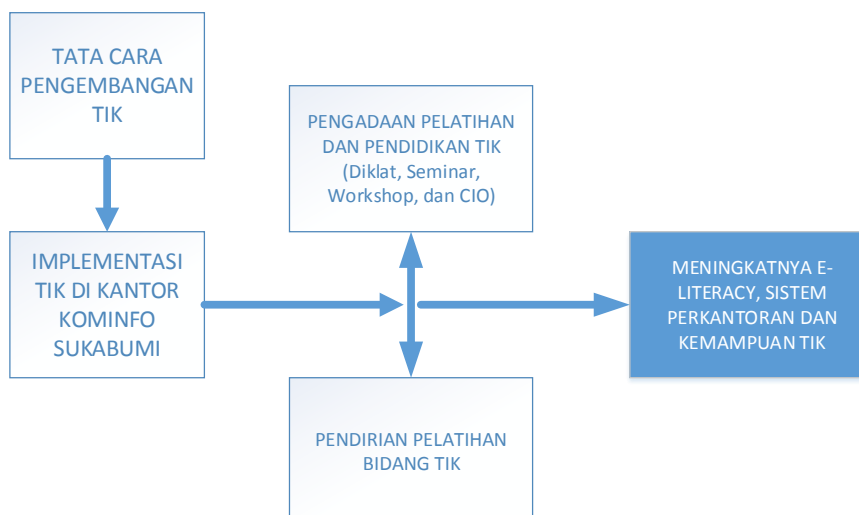
Pendidikan CIO bagi pemerintah Kota Sukabumi dan daerah lainnya, merupakan salah satu pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh aparat pemerintah di bidang TIK dalam menghadapi dinamika perkembangan TIK yang semakin canggih, sehingga bagi aparat pemerintah mampu memanfaatkan dan mengikuti kemajuannya. Secara empirik *ability* pengelolaan organisasi pemerintah perlu menyesuaikan dengan pola pengakomodasian perkembangan TIK. Gagasan pendidikan CIO yang digagas oleh Kementerian Kominfo merupakan salah satu cara meningkatkan SDM aparat sebagai *enterprise leadership* yang mencakup kebutuhan dalam suatu jabatan maupun kemampuan dalam bidang TIK (Supangkat, 2008). Dengan demikian struktur pemerintah kabupaten atau kota memiliki tanggungjawab sebagai *enabler* di bidang TIK. Sebagaimana Magister Teknik Informasi (MTI) UGM, merumuskan, bahwa : CIO sebagai penyusun strategi TIK yang bisa melahirkan transformasi relasi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan sesama lembaga pemerintah dalam suatu jaringan atau koneksi yang integratif, penyelaras proses birokrasi dimana pengembangan TIK harus berjalan seiring dengan birokrasi yang ada, serta dengan pendidikan tersebut memberikan solusi dan dapat mendefinisikan tujuan dan sasaran yang akan

diimplementasikan strategi pengembangan dan operasionalnya.

Berdasarkan upaya tersebut, peran dan fungsi aparat dalam aktifitasnya, diharap akan tercapai tiga hal berikut: (1). Meningkatnya ketrampilan para pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi di bidang TIK. (2) Terselenggaranya program-program pelatihan, pendidikan dan penelitian TIK, baik secara sistem pengelolaan kantor maupun teknis. Dan (3) Meningkatnya pembudayaan pemanfaatan dan pendayagunaan TIK, seperti dalam kultur berbagi (*sharring*) informasi serta kultur mendokumentasi sebagai bagian dari ISO 9000 dan standar *software engineering*. Sistem pengembangan tersebut, juga dampaknya dalam aktivitas kantor akan mempunyai para pegawai yang memiliki kemampuan yang cepat, mudah, murah bagi manajemen kantor, serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat membantu para pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi untuk melibatkan secara langsung dan sejumlah kesempatan, sehingga mampu meningkatkan sistem koneksitas jaringan antara SKPD. Proses *knowledge sharing* sangat bergantung pada peran aktif dari berbagai dinas, karena hal ini bukan domain Kominfo saja untuk menghasilkan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan dukungan TIK serta peran aktif berbagai *stakeholders* terkait memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, maka untuk mewujudkan Kota Sukabumi sebagai *cyber city* sekaligus merupakan sarana untuk mempercepat proses pertukaran informasi antar piha-pihak dalam proses pembangunan informasi.





**Gambar 4.** Sistem Pengembangan SDM di Bidang TIK Pada Pemkot Sukabumi  
**Picture 4.** HR Development System in ICT Scope At Sukabumi City Government

Keterbatasan SDM ini terutama di level *grass root* (aparatur di level bawah), maka keberadaan TIK perlu dimodifikasi dengan media konvensional, sarana telekomunikasi dan media komunikasi difungsikan dalam mempercepat proses berbagi pengetahuan, bahkan diterapkan sampai pada level kecamatan dan kelurahan dalam bentuk pusat-pusat informasi untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan. Berdasarkan pada sistem pengembangan SDM yang sedang dan akan dilakukan tersebut, dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti pada gambar 4.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Kebijakan Pemkot Sukabumi dalam mengimplementasi konsep *cyber city* telah dilakukan secara komprehensif dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni dengan menyatukan kesamaan komitmen dan tanggungjawab dalam menghadapi strategi pembangunan daerah TIK secara berkelanjutan. Aparatur pemerintah sebagai pengelolanya telah diberikan komitmen untuk menghadapi tantangan

kemajuan TIK dalam suatu *e-literacy*, seperti dalam penguasaan *e-government*, *e-procurement*, *e-budgetting*, *e-controlling*, *e-business* dan *cyber law*, sehingga dapat melayani publik lebih baik lagi.

Keberadaan jaringan internet sebagai fasilitasi pemenuhan hak warga untuk memperoleh informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan oleh Pemkot Sukabumi sebagai implementasi konsep *cyber city*, tetapi dalam transparansi informasi yang bersifat teknis masih kurang, hal ini karena masih ada *screening* konten berita sebelum di upload kepada masyarakat oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pengembangan Sistem pendidikan dan pelatihan dalam membentuk keahlian dan ketrampilan TIK kepada para aparatur pemerintah dilakukan dengan *knowledge sharing* yang berbasis pada *learning by doing* yang langsung dipraktikkan setiap materi pelatihan, yakni dengan materi pelatihan menggunakan aplikasi pengolah data, pengolah lembar kerja, dan penggunaan jaringan internet.

## B. Saran

Agar dapat meningkatkan transparansi konten informasi yang disajikan pada sistem *cyber city*, hendaknya seluruh pejabat yang memimpin SKPD untuk berkomunikasi dan *sharing* informasi secara berkala dalam jaringan *online*, sehingga aspek informasi yang dibutuhkan masyarakat lebih *competence, transparency dan accountability*. Sedangkan sumber daya aparat yang ada perlu ditingkatkan lagi, baik dari aspek manajerial maupun kemampuan teknis di bidang TIK, serta dukungan dan komitmen pemerintah terhadap konsep *cyber city* dapat diselaraskan dengan program *Jabar Cyber Province* (JCP), sedangkan dalam meningkatkan kemampuan *enterprise leadership* dalam suatu kemampuan bidang TIK, para aparat pemerintah hendaknya diberi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, setingkat *Chief information officer (CIO)*.

(Setiawan, 2017)

(Tsai, Hong and Shiu, 2016)

Setiawan, S.R.D., 2017. *Laba BRI 2016 Tumbuh Tipis Jadi Rp 25,8 Triliun*. [online] Kompas. Available at: <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/31/184202226/laba.bri.2016.tumbuh.tipis.jadi.rp.25.8.triliun>> [Accessed 6 Apr. 2017].

Tsai, C.-W., Hong, T.-P. and Shiu, G.-N., 2016. Metaheuristics for the Lifetime of WSN: A Review. *IEEE Sensors Journal*, 16(9), pp.2812–2831.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu agar penelitian ini terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bwalya, K. J., 2009. Factors Affecting Adoption of E-Government in Zambia. *Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, XXXVII (4)
- Budhirianto, S. (2014). Pengembangan Jabar Cyber Province Sebagai Media Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 17 No. 1 Juli 2014 , BPPKI Bandung.
- Dwiyanto, A, (Ed),2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fahrurrazi, 2015. *Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2015-2019*, [online] Web-blog. Available at: <<http://fahrurrazi.net/site/archives/181>> [Diakses tanggal 12 Mei 2017].
- Fang, Z., 2002. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *International journal of The Computer, The Internet and Management*, X (2)
- Flippo, E .B., 1984. *Personel Management*, Singapore: McGraw Hill.
- Harimurti, A., 2007, E-Government: Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Studi Penerapan di Pemerintah Provinsi DIY. *Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX*. Jakarta: Badan litbang SDM.
- Kelly, J. M., & Swindell, D., 2002. Service Quality Variable Across Urban Apace: First Steps Towards A Model of Citizen Satisfaction. *Journal of Urban Affairs*, XXIV.
- InfoDev, 2002. *The E-Government Handbook for Developing Countries A Project of InfoDev and the Center for Democracy & Technology*.
- Indrajit, R. E., 2012. *E-government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jayanta & Pramiyati, T., 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kec Mandalawangi, Kab Pandeglang. *Bina Wdya*, 26(1), pp.35-41

- Supangkat, S. H., 2008. *CIO Chief Information Officer*. Bandung: The Indonesian ICT Institution.
- Suyanto, A. H., 2009. *Step By Step Web Design: Theory and Practices*. Yogyakarta : Andi
- Rahbi, Y., Al Harrasi, S., dan Al Wah Aibi, S., 2013. *Technical Factors Affecting of The E-Government*.
- Seifert, J. W., & Petersen, R. E., 2002. *The Promise of All Things E Expectations and Challenges of Emergent Electronic Government. Perspective on Global Development and Technology*, I, 193.
- Shanab, A. E., 2012. Digital Government Adoption in Jordan: An Encironmental Model. *International Arab Journal Of Technology*, III(2)
- Spence, W. R., 1994. *Innovation: The Communication of Change in Ideas, Practices, and Products*
- William B. W., 1996. Fifth Edition , *Human resources and Personal Management*, McGrow Hill, Inc right Reserved. Printed in The USA
- Wimmer, Roger D. Dominick, Joseph R., 2000. *Mass Media Research*. New York: Wadsworth Publishing Company.

